

PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

**Muhdar¹, Sun Mamonto², Saljuliani K. Tamau³, Zamroni Podungge⁴, Mutiara
Tulungen⁵, M. Nur Ch Fikri Abd Aziz⁶**

^{1,2,3,4,5,6}IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: muhdar73@gmail.com¹, mamontosun@gmail.com², saljulianikt@gmail.com³,
zamronipodungge95@gmail.com⁴, thyatulungen18@gmail.com⁵, fikriaziz1227@gmail.com⁶

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah penetapan upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan serta mengidentifikasi kesenjangan hasil (research gap) dari berbagai penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah studi literatur (systematic review) terhadap penelitian yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan masih belum konsisten. Sebagian penelitian menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh positif maupun tidak signifikan. Selain itu, faktor lain seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga memiliki peran penting dalam memengaruhi kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upah minimum tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen dalam pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan dukungan variabel ekonomi lainnya agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif.

Kata Kunci: Upah Minimum, Kemiskinan, Pengangguran, Kesejahteraan, Indonesia.

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional issue that remains a challenge to economic development in Indonesia. One government policy to improve public welfare is the establishment of a minimum wage. This study aims to analyze the effect of the minimum wage on poverty and identify research gaps in previous studies. The method used was a systematic review of relevant literature. The analysis shows that the effect of the minimum wage on poverty remains inconsistent. Some studies found that the minimum wage had a negative effect on poverty, while others showed a positive or insignificant effect. Furthermore, other factors such as unemployment, economic growth, and the Human Development Index (HDI) also play a significant role in influencing poverty. This study concludes that the minimum wage cannot be the sole instrument for poverty alleviation; therefore, support from other economic variables is needed for more effective policy implementation.

Keywords: Minimum Wage, Poverty, Unemployment, Welfare, Indonesia.

PENDAHULUAN

Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Indonesia, sebagai negara berkembang, telah lama menghadapi persoalan kemiskinan yang sangat kompleks. Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya. Kemiskinan telah membuat pengangguran semakin banyak, inflasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu Negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masalah Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin secara nasional menyusut dari 10,19% pada September 2020 menjadi 8,47% pada Maret 2025. Penurunan ini selaras dengan jumlah absolut penduduk miskin yang turun dari 27,55 juta menjadi 23,85 juta orang dalam periode yang sama.. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami

pengangguran dalam bekerja hal inilah yang membuat sulitnya memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada dan naik. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya jumlah penduduk yang terus meningkat, upah minimum yang dirasa masih kurang cukup, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat pengangguran yang masih tinggi akan berdampak pada sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali, dengan tidak ada penghasilan yang dimiliki menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi maka kemiskinan akan timbul.

Menurut (Karimi et al., 2023) masalah ketimpangan akan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia karena mereka yang kaya akan cenderung semakin kaya dan mereka yang miskin akan semakin miskin. Adanya perbedaan pendapatan yang tinggi ini membuat masyarakat cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pendapatan, karena adanya jarak antara individu kaya dengan individu miskin dan masyarakat miskin akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan akan lebih mudah masuk kedalam garis kemiskinan. Arsyad dalam (Mahsunah, 2022) mengatakan kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi. Artinya dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa pengetahuan dan keterampilan yang

rendah, miskin aset serta organisasi sosial politik. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan sumber keuangan, informasi, dan jaringan sosial. Kemiskinan muncul karena beberapa orang belum mampu mengelola kehidupan mereka dengan standar kemanusiaan.

Menurut (Purnama, 2017) hal ini yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan terhadap produktivitas dan pendapatan. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan adalah upah minimum, karena tujuan utama ditetapkannya upah minimum yaitu memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kebutuhan pokok, kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha 4 untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Meningkatnya upah minimum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat. Karena, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari seberapa besar penghasilan yang mereka dapatkan. Upah bagi masyarakat merupakan sumber atas penghasilan. Apabila terjadi kenaikan atas jumlah penghasilan, tentunya akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Sebaliknya, bila upah mengalami penurunan maka berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan (Ningrum, 2017).

Kebijakan mengenai upah minimum kabupaten dan kota diharapkan nantinya

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan jaminan atas penghasilan atas pekerjaan kaum buruh, kebijakan upah minimum juga diharapkan mampu menjadi media distribusi pemerataan pembangunan pada tiap daerah. Peningkatan pendapatan masyarakat pada masing-masing daerah nantinya juga mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan berdampak pada berkurangnya laju migrasi. Kebijakan mengenai upah minimum juga pada ujungnya akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan daya beli masyarakat. Ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat berdampak kepada terbentuknya jurang kemiskinan (Nisa et al., 2020). Kemiskinan itu sendiri merupakan persoalan pada setiap negara, dan seringkali menjadi permasalahan yang nyaris tidak ada ujungnya. Kemiskinan akan berakibat pada turunnya taraf hidup masyarakat sehingga berdampak pada terbatasnya pemenuhan kebutuhan setiap hari (Nasution, 2019). Ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar merupakan pengertian kemiskinan secara umum (Sartika et al., 2016). Pada sisi yang lain, kemiskinan menjadi pangkal persoalan sosial yang lain, baik masalah kriminalitas atau masalah ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dan lapangan kerja secara layak. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan upah minimum merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak dari para pekerja. Adanya kebijakan upah minimum ini menjadi suatu batasan nilai upah bagi para

pekerja dikarenakan terdapat aturan yang melarang bagi pengusaha untuk membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Pada berbagai negara adanya upah minimum ini merupakan hal penting dan utama dalam menetapkan upah dalam lingkup nasional. Penerapan kebijakan upah minimum di Indonesia terdapat berbagai variasi menurut provinsi, kabupaten, dan sektor serta untuk nominalnya ditentukan oleh pihak pemerintah provinsi dan kabupaten dengan menganalisis dari kebutuhan hidup layak pekerja. Penerapan kebijakan upah minimum ini pada awalnya bahkan hingga saat ini banyak menimbulkan pro-kontra di berbagai pihak dikarenakan menimbulkan pengaruh hingga ke berbagai hal dan sektor-sektor tertentu. Namun apabila melihat dari sisi positifnya, adanya penerapan kebijakan ini dinilai dapat menekan angka kemiskinan. Melihat kondisi saat ini, kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menjadi isu utama yang dibahas karena berhubungan erat dengan faktor keberhasilan dalam pembangunan negara.

Melalui adanya penerapan kebijakan ini, pemerintah berharap masalah kemiskinan di Indonesia dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien. Namun, dengan adanya kebijakan ini sebagian pihak juga masih kurang setuju dikarenakan adanya penetapan upah minimum ini dapat menyebabkan pengurangan kesempatan kerja. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan. Menurut Sumarsono, pengupahan di

Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.

Menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upah Minimum

Menurut Sadono Sukirno (2002:353) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan memengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah maupun yang akan dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi

kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Pemberian upah minimal pada pekerja bertujuan agar para pekerja mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Upah minimum sendiri diartikan sebagai upah terendah yang diterima setiap bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap dimana penetapan upah dilakukan gubernur. Masing-masing daerah mempunyai standar kebutuhan hidup yang berbeda, sehingga situasi ini yang menjadikan besaran upah minimum tidak berlaku secara nasional namun hanya berlaku untuk wilayah tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah minimum terbagi atas: (a) upah minimum provinsi; (b) upah minimum kabupaten/kota; (c) upah minimum sektoral provinsi; dan, (d) upah minimum sektoral kabupaten/kota. Penetapan upah dilakukan oleh gubernur selaku kepala daerah. Penetapan upah minimum disesuaikan dengan penilaian kebutuhan hidup layak serta dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja yang masih lajang untuk dapat hidup layak selama satu bulan.

Teori pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja (Todaro model) menyatakan dalam model Todaro-Harris, pertumbuhan penduduk memperbesar jumlah pencari kerja, terutama di wilayah urbanisasi. Urbanisasi cepat yang tidak disertai

penciptaan lapangan kerja yang memadai akan meningkatkan pengangguran terbuka. (Todaro, M.P & Smith, S.C. 2009) Teori yang menyatakan upah minimum dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu teori pengangguran struktural dan friksional. Pertumbuhan penduduk mempercepat masuknya angkatan kerja baru, tetapi tidak selalu selaras dengan struktur pekerjaan yang tersedia sehingga menciptakan pengangguran struktural dan upah minimum yang tidak fleksibel juga bisa memperlambat proses penyesuaian pasar tenaga kerja, memperburuk pengangguran friksional dan struktural.

Teori makro ekonomi, masalah pengangguran di bahas pada dasar tenaga kerja yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah tenaga kerja. Upaya menurunkan tingkat pengangguran sangatlah penting. Terjadinya pengangguran akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. (Risen A. Sambaulu, 2022). Teori permintaan dan penawaran tenaga kerja (Neoklasik) menyatakan bahwa pasar tenaga kerja bekerja seperti pasar barang. Upah adalah harga tenaga kerja jika upah minimum ditetapkan di atas upah keseimbangan pasar, maka Permintaan tenaga kerja menurun karena perusahaan enggan membayar lebih mahal penawaran tenaga kerja meningkat lebih banyak orang ingin bekerja dengan upah lebih tinggi. Akibatnya terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, yang disebut sebagai pengangguran (Mankiw, 2021). Selain itu, Keynes menekankan bahwa pengangguran bersifat involuntary unemployment, yaitu

kondisi ketika individu bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku tetapi tetap tidak memperoleh pekerjaan karena permintaan agregat yang tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Oleh sebab itu, Keynes menekankan perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan belanja pemerintah, subsidi sektor produktif, dan pembangunan infrastruktur, untuk mendorong permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga permintaan agregat untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, termasuk melalui sektor pariwisata, guna menjaga pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran (Irnando, Zulaikah, & Satriawan, 2025). Selain menjelaskan penyebab terjadinya pengangguran, Keynes juga menekankan bahwa upah memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam pembentukan permintaan agregat. Dalam kerangka teori Keynesian, upah tidak hanya dipandang sebagai biaya produksi bagi perusahaan, tetapi juga merupakan sumber pendapatan utama bagi rumah tangga yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Keynes (1936), peningkatan upah akan memperkuat daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong konsumsi serta memperluas permintaan agregat.

Kondisi ini menstimulasi perusahaan untuk menambah produksi dan memperluas kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya menurunkan pengangguran.

Keynes juga menekankan bahwa perubahan upah memiliki implikasi makroekonomi melalui konsep *effective demand* atau permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan total permintaan agregat yang dianggap perusahaan sebagai dasar perencanaan produksi. Dengan demikian, upah yang lebih tinggi dapat memperkuat permintaan efektif karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan permintaan agregat. Peningkatan konsumsi ini kemudian mendorong perusahaan meningkatkan output, memperkuat arus produksi, dan menjaga stabilitas aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Keynes juga mengatakan bahwa upah memiliki sifat kaku ke bawah atau rigid artinya upah tidak dapat diturunkan meskipun kondisi ekonomi sedang melemah. Oleh sebab itu, Keynes menolak pandangan klasik bahwa penurunan upah tidak memperbaiki pasar tenaga kerja.

B. Teori Kemiskinan

Teori Kemiskinan Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dialami oleh negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Menurut Ritonga (2003), kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya.

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk

memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat, 2007:4)

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan.

Menurut Tambunan (2019) kemiskinan dapat digolongkan dalam beberapa kategori yaitu: 1. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhankebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan relatif, adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan, dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi pendapatan. Kemiskinan alamiah disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau kerja keras, etos kerja sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.

C. Hubungan Upah Minimum dengan pengentasan Kemiskinan

Menurut Oetomo, Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah upah. Upah merupakan suatu permasalahan yang cukup menarik karena sebagian besar dari pengangguran yang ada lebih memilih bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup (walaupun masih mencari pekerjaan yang lebih baik tingkat upahnya), dari pada dipaksakan bekerja di sektor formal dengan upah yang minim. Jadi bukan berarti lapangan pekerjaan tidak tersedia, tetapi informasi dari lapangan pekerjaan tersebut yang minim sehingga sulit untuk mencari pekerjaan dengan upah yang sesuai walaupun sebenarnya pemahaman tentang upah yang sesuai adalah relatif dengan kebutuhan yang ada. Menurut Gindling an Terrell, para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa kekakuan di pasar tenaga kerja, seperti kekakuan upah yang disebabkan oleh upah minimum, dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pada gilirannya memberikan kontribusi pada pengangguran dan kemiskinan. Menurut Burkhauser et.al, Penentang peraturan upah minimum juga berpendapat bahwa kebijakan upah minimum hanya memiliki dampak terbatas pada kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur. Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain

yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

Pendapat (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 2002. hlm. 90) yang mengungkapkan bahwa studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Menurut (P. Indra & Cahya Ningrum, 2019.hlm. 25) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (literature review). Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan upah minimum dan kemiskinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Results

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, upah minimum menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang berperan dalam menentukan tingkat pendapatan pekerja. Seiring dengan dinamika ekonomi dan perubahan kondisi pasar tenaga kerja, upah minimum menjadi

variabel yang penting dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Berbagai studi terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan, namun hasil yang diperoleh masih bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi, karakteristik wilayah, serta faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai artikel ilmiah terdahulu untuk mengidentifikasi bagaimana upah minimum mempengaruhi tingkat kemiskinan di berbagai daerah, serta menganalisis faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan tersebut.

Berikut merupakan hasil analisis penelitian terdahulu yang telah dikaji dalam studi literatur ini sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Implikasi
1.	Ali Mauludi AC,dkk (2023)	Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks	Upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap upah minimum, sedangkan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal	Variabel-variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 99,3% terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur

		ks Pem ban gun an Man usia , Dan Bela nja Mo dal Ter had ap Ke mis kina n Kab upat en/ Kot a di Jaw a Tim ur Tah un 201 7 s/d 202 1	berpen garuh negatif signifik an.	
2.	Nurin a Merdi kawati & Ridho Al Izzati (2025)	Keb ijak an Upa h Min imu dan Ke mis	Upah minim um memili ki dampa k distrib usi pada pekerja upahan	Kebijak an upah minimu m memilik i efek yang terbatas terhada p perubah

		kin an di Ind one sia	di persent il ke-20 hingga menen gah tanpa kehilan gan pekerja an secara keselur uhan, namun tidak berdam pak pada pengel uaran per kapita rumah tangga	an status kemiski nan di Pulau Jawa.
3.	Dewa Putu Yudi Pardit a, dkk (2024)	Me mah ami Din ami ka Ke mis kina n di Indo nesi a: P eran Per tum buh an Eko nom i, Di strib	Pertum buan ekono mi dan distribu si pendap atan berpen garuh signifik an terhada p kemisk inan, sedang kan IPM tidak memili ki	Pemerin tah direkom endasik an menera pkan pajak progresi f, bantuan tunai langsun g, serta mening katkan investas i pendid ikan unt uk mem perluas akses

		usi Pen dap atan , da n Pem ban gun an Man usia	dampa k signifik an secara parsial.	kualitas bagi masyara kat
4.	Indah Tri Utami & Mohammad Rofiu ddin (2022)	Ana lisis pen garu h upa h mini mu m, bela nja pem erint ah dan pen dap atan asli daer ah terh ada p ting kat kem iski nan pad a prov insi may	Belanja pemer intah dan PAD mengur angi kemisk inan, sement ara upah minim um tidak berpen garuh terhada p kemisk inan di provins i mayori tas Musli m.	Menjela skan peran penting belanja pemerin tah dan Pendapa tan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pengent asan kemiski nan

		orita s mus lim		
5.	Danny Nur Febria nica & Devan to Shasta Prato mo (2015)	Ana lisis Da mpa k Keb ijak an Upa h Min imu m Ter had ap Ke mis kina n di Indo nesi a	Pekerja miskin di Indone sia umumn ya berada pada usia tua (>66 tahun). Upah minim um diharap kan mening katkan standar hidup namun berisik o mengur angi penyer apan tenaga kerja.	Meneka nkan perluny a memaha mi karakter istik pekerja miskin untuk menent ukan efektivit as kebijaka n upah sebagai instrum en anti- kemiski nan.
6.	Kelly Bird & Chris Manni ng (n.d.)	Upa h Min imu m dan kem iski nan di	Kenaik an upah minim um mening katkan pendap atan rumah	Tiga dari empat rumah tangga miskin mengala mi kerugia n

		negara berkembang: Simulasi dari survei rumah tangga di Indonesia	tanggapan pekerja upah rendah, namun biaya tersebut dialihkan ke harga konsumen yang lebih tinggi	bersih, sehingga upah minimum dianggap tidak efisien sebagai instrumen anti-kemiskinan di Indonesia.
7.	Nurina Merdikawati dan Ridho Al Izzati (2025)	Kebijakan Upah Minimum dan Kemiskinan di Indonesia	Kebijakan upah minimum memiliki efek positif terhadap upah pekerja di persentil ke-15 hingga ke-30 tanpa menyebabkan kehilangan lapangan kerja secara keseluruhan. Namun	Upah minimum di Indonesia kurang efektif sebagai instrumen tunggal untuk pengentasan kemiskinan karena dampaknya yang terbatas pada status kemiskinan individu. Strategi

			, kebijakan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga per kapita maupun perubahan status kemiskinan.	pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih sistematis di luar sekadar penyesuaian upah minimum
8.	Tamaria Br. Sidebanging, dkk (2024)	Pengaruh Upah Minimum dan Pendapatan Pajak terhadap Kemiskinan di Indo	Upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (setiap kenaikan 1% upah menurunkan kemiskinan 12,26%).	Peningkatan upah minimum efektif untuk menyejahterakan masyarakat, namun kebijakan pajak perlu dikelola agar tidak menambah beban

		nesia	Sebaliknya, pendapatan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.	ekonomi yang memicu kemiskinan.
9.	Heny Herawati, dkk (2024)	Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mampu menekan angka kemiskinan, namun dampaknya bervariasi tergantung pada struktur ekonomi daerah.	Pemerintah daerah perlu menyesuaikan upah minimum dengan kemampuan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha di daerah masing-masing.

10.	Nur Siti Annazah, dkk (2024)	Analisis CGE tentang Dampak Kenaikan Upah Minimum 2024 terhadap Perilaku Konsumsi Nasional	Kenaikan upah 15% menyebabkan penurunan PDB riil (-0,24%), meskipun konsumsi rumah tangga meningkat.	Kebijakan kenaikan upah yang drastis memiliki <i>trade-off</i> yang harus dipertimbangkan matang agar tidak mengganggu stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.
11	Imron Natsir, dkk (2025)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia	Inflasi dan pengangguran memiliki korelasi positif yang kuat terhadap kemiskinan, sementara pertum	Kebijakan stabilitas harga (pengendalian inflasi) sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat miskin agar

		nesi a: Pen dek atan Eko nom i Mak ro	buhan ekono mi menunj ukkan arah negatif terhada p kemisk inan.	tidak semakin terpuruk .
12	Faisal, dkk (2021)	Pen garu h Upa h Min imu m, Infl asi, dan Pen gan ggur an Ter had ap Ke mis kina n di Pro vins i Sula wesi Sela tan	Upah minim um dan pengan gguran berpen garuh positif dan signifik an terhada p kemisk inan. Sement ara itu, inflasi tidak memili ki pengar uh signifik an terhada p kemisk inan di Sulawe si Selatan .	Kebijak an peningk atan upah minimu m di wilayah ini justru berkorel asi dengan naiknya kemiski nan, kemung kinan karena adanya pengura ngan tenaga kerja (PHK) akibat beban upah, sehingg a pencipta an lapanga n kerja lebih utama.

13.	Iis Amali a, dkk (2025)	Ana lisis Pen garu h Pert umb uha n Eko nom i, Upa h Min imu m, dan Pen gan ggur an terh ada p Ke mis kina n di Pro vins i Jaw a Bar at	Pertum buhan ekono mi dan upah minim um berpen garuh negatif dan signifik an terhada p kemisk inan. Sebalik nya, pengan gguran berpen garuh positif signifik an	Untuk meneka n kemiski nan di Jawa Barat, pemerin tah perlu menjaga stabilita s upah minimu m dan mencipt akan lapanga n kerja guna mengur angi pengang guran.
14.	Maulu di dkk	Pen garu h Upa h Min imu m terh ada p	Upah minim um berpen garuh positif signifik an terhada p	Upah minimu m berpeng aruh positif signifik an terhada p

		Ke mis kina n di Jaw a Tim ur	kemisk inan	kemiski nan
15.	Natas ya dkk	Ana lisis Upa h Min imu m terh ada p Ke mis kina n di Ace h	Upah minim um berpen garuh negatif signifik an terhada p kemisk inan	Peningk atan upah minimu m dapat mening katkan kesejaht eraan dan menuru nkan kemiski nan
16.	Okow ali dkk	Pen garu h UM K terh ada p Ke mis kina n di Pap ua	Upah minim um tidak berpen garuh signifik an terhada p kemisk inan	Faktor lain seperti pengang guran dan infrastru ktur lebih domina n dalam mempe ngaruhi kemiski nan
17.	Eraya nti & Suasih	Pen garu h Rasi o Kes emp atan	Upah minim um berpen garuh negatif signifik an	Kebijak an upah minimu m dapat menjadi alat untuk menuru

		Kerj a dan Upa h Min imu m terh ada p Ke mis kina n di Bali	terhada p kemisk inan	nkan kemiski nan jika didukun g faktor lain
18.	Lestari & Susana (2021)	Ana lisis Pen garu h Upa h Min imu m dan Pen gan ggur an terh ada p Ke mis kina n sert a Da mpa kny a pad a Pert	Upah minim um dan pengan gguran tidak berpen garuh langsung signifik an terhada p kemisk inan, tetapi berpen garuh terhada p pertum buhan ekono mi melalui kemisk inan (77,6%).	Kebijak an pengupa han dan pengura ngan pengang guran perlu dikombi nasikan dengan pengent asan kemiski nan untuk mening katkan pertumb uhan ekonom i.

		umb uha n Eko nom i di Pro vins i Jam bi		
19.	Syahb ana dkk. (2025)	Pen garu h Upa h Min imu m dan Jum lah Pen dud uk Mis kin terh ada p Pert umb uha n Eko nom i Pro vins i Sum ater a Utar a	Upah minim um berpen garuh positif signifik an terhada p pertum buhan ekono mi, sedang kan kemisk inan berpen garuh negatif signifik an.	Perlu sinergi antara kebijaka n upah minimu m dan program pengura ngan kemiski nan untuk mendor ong pertumb uhan ekonom i berkela njutan.

20.	Meng ko dkk. (2023)	Pen garu h Pert umb uha n Eko nom i, Upa h Min imu m dan Pen didi kan terh ada p Ke mis kina n di Kot a To moh on	Upah minim um berpen garuh positif signifik an terhada p kemisk inan, pertum buhan ekono mi tidak signifik an, pendidi kan tidak signifik an.	Kebijak an upah minimu m perlu dikaji agar tidak mening katkan kemiski nan serta harus diimban gi dengan peningk atan kualitas SDM.
21.	Fadill ah (2016)	Ana lisis Pen garu h Pert umb uha n Eko nom i, Pen didi kan, Upa	Pertum buhan ekono mi dan upah minim um berpen garuh negatif signifik an terhada p kemisk inan,	Peningk atan pertumb uhan ekonom i dan upah minimu m dapat menjadi strategi utama dalam menuru nkan

		h Min imu m dan Pen gan ggur an terh ada p Ke mis kina n di Jaw a Tim ur	penga nguran positif tidak signifik an.	kemiski na
22.	Hanifa h & Hanifa (2021)	Pen garu h Pert umb uha n Eko nom i, Upa h Min imu m, dan Pen gan ggur an terh ada p Ke mis kina n di	Secara simulta n berpen garuh signifik an, secara parsial pertum buhan ekono mi dan upah minim um berpen garuh negatif signifik an, penga nguran tidak signifik an.	Pengura ngan kemiski nan dapat dilakuk an dengan mening katkan pertumb uhan ekonom i dan kebijaka n upah minimu m yang tepat.

		Kab upat en Lam ong an		
--	--	---------------------------------------	--	--

Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu yang telah dirangkum, terlihat bahwa hubungan antara upah minimum dan kemiskinan menunjukkan tiga pola utama, yaitu pengaruh negatif, pengaruh positif, dan tidak signifikan. Perbedaan hasil ini mencerminkan adanya variasi kondisi empiris antar wilayah serta perbedaan variabel yang digunakan dalam masing-masing penelitian.

Kelompok pertama adalah penelitian yang menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini ditunjukkan oleh Sidebang dkk. (2024), Herawati dkk. (2024), Amalia dkk. (2025), Natasya dkk., Erayanti & Suasih, Fadillah (2016), serta Hanifah & Hanifa (2021). Secara umum, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum mampu meningkatkan pendapatan pekerja sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Bahkan secara kuantitatif, Sidebang dkk. (2024) menunjukkan bahwa

setiap kenaikan 1% upah minimum mampu menurunkan kemiskinan sebesar 12,26%. Selain itu, Herawati dkk. (2024) menekankan bahwa dampak tersebut dapat berbeda tergantung struktur ekonomi daerah, sedangkan Amalia dkk. (2025) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut akan semakin kuat apabila diikuti dengan penurunan pengangguran. Dengan demikian, pada kelompok ini, upah minimum terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok kedua adalah penelitian yang menemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini ditunjukkan oleh Mauludi dkk. (2023), Faisal dkk. (2021), Mengko dkk. (2023), serta beberapa temuan lain di Jawa Timur. Penelitian Mauludi dkk. (2023) menunjukkan bahwa meskipun variabel lain seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal mampu menurunkan kemiskinan, namun upah minimum justru meningkatkan kemiskinan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Faisal dkk. (2021) di Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum berkorelasi dengan meningkatnya kemiskinan. Mengko dkk. (2023) juga menemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif

signifikan terhadap kemiskinan di Kota Tomohon. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dalam kondisi tertentu dapat memberikan dampak yang berlawanan, terutama jika tidak diimbangi dengan kondisi pasar tenaga kerja yang stabil.

Kelompok ketiga adalah penelitian yang menemukan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh Utami & Rofiuddin (2022), Okowali dkk., serta Lestari & Susana (2021). Utami & Rofiuddin (2022) menemukan bahwa di provinsi mayoritas Muslim, upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sementara belanja pemerintah dan PAD justru memiliki peran yang lebih besar. Okowali dkk. juga menunjukkan bahwa di Papua, faktor lain seperti pengangguran dan infrastruktur lebih dominan dalam mempengaruhi kemiskinan dibandingkan upah minimum. Sementara itu, Lestari & Susana (2021) menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan, tetapi berpengaruh secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 77,6%. Hal ini menunjukkan bahwa peran upah minimum dalam mengurangi kemiskinan tidak selalu bersifat langsung.

Selain melihat pengaruh langsung, beberapa penelitian juga menyoroti keterbatasan efektivitas upah minimum sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Merdikawati & Al Izzati (2025) dalam dua temuan yang konsisten menunjukkan bahwa upah minimum hanya berdampak pada distribusi upah pekerja di kelompok tertentu (persentil bawah), namun tidak berdampak signifikan terhadap pengeluaran per kapita maupun perubahan status kemiskinan. Kelly Bird & Chris Manning juga menemukan bahwa kenaikan upah minimum meningkatkan pendapatan sebagian rumah tangga, tetapi menyebabkan kenaikan harga, sehingga sebagian besar rumah tangga miskin justru mengalami kerugian bersih. Dengan demikian, kebijakan upah minimum dinilai memiliki efek yang terbatas dan tidak merata.

Penelitian lain menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh variabel selain upah minimum. Natsir dkk. (2025) menunjukkan bahwa inflasi dan pengangguran memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif. Pardita dkk. (2024) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara IPM tidak signifikan secara parsial. Sementara itu, Syahbana dkk. (2025) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun kemiskinan tetap berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara variabel ekonomi bersifat kompleks dan saling berkaitan.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang menekankan adanya trade-off dalam kebijakan upah minimum. Annazah dkk. (2024) menunjukkan bahwa kenaikan upah sebesar 15% mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga, tetapi di sisi lain menurunkan PDB riil sebesar -0,24%. Febrianica & Pratomo (2015) juga menegaskan bahwa meskipun upah minimum bertujuan meningkatkan standar hidup, terdapat risiko berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tidak terdapat kesimpulan tunggal mengenai pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan. Sebagian penelitian menunjukkan efek penurunan kemiskinan, sebagian menunjukkan peningkatan kemiskinan, dan sebagian lainnya menunjukkan tidak adanya pengaruh. Selain itu, banyak penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum sangat dipengaruhi oleh variabel lain seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, distribusi pendapatan, serta kondisi struktural daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sebagian penelitian menemukan bahwa kenaikan upah minimum mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun,

penelitian lain menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum justru berpotensi meningkatkan kemiskinan akibat berkurangnya kesempatan kerja. Selain itu, terdapat pula temuan yang menyatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap serta mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh upah minimum, tetapi juga oleh faktor lain seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, kebijakan upah minimum tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, melainkan perlu didukung oleh kebijakan ekonomi lainnya agar lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akbar¹, Nazipawati², Novegya Ratih Primandari³, dan Novie Al Muhariah⁴ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2017-2020
- Ali Mauludi AC Fadllan Fitri Nur Rahmawati Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021 <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia> DOI: 10.1905/iqtishadia.v 10 i1.xxx
- Amalia Yudith Berliana, Delia Ayu Rahmawati, Penerapan Kebijakan Uah Minimum Terhadap Kemiskinan Dan Penyerapan Tenaga erja Provinsi Jawa Tengah Jurnal Ekonomi & Bisnis, Hal 99 – 108 Volume 10, Nomor 1, Maret 2025
- Ardhian Kurniawati, Beni Teguh Gunawan, Disty Putri Ratna Indrasari, Dampak Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014, Journal Of Research In Economics and Management, Volume 17, No. 2, Juli – Desember, h.2.
- Celly Andika Devy 1 , Risqi Noor Hidayati Putri² Pengaruh Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Barat EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.5, No.3, Maret 2026
- Danny Nur Febrianica & Devanto Shasta Pratomo (2015) Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015
- Dewa Putu Yudi Pardita, dkk (2024) Memahami Dinamika Kemiskinan di Indonesia: Peran Per umbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Pembangunan Manusia JURNAL RISET ILMU EKONOMI www.jrie.feb.unpas.ac.id ISSN 2776-4567 Understanding Poverty Dynamics in Indonesia: The Role Economic Growth, Income Distribution, and Human Development
- Erina Mega Alliyah Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005-2022 Sosio e-Kons P-ISSN 2085-2266, E-ISSN

- 2502-5449 DOI:
<http://dx.doi.org/10.30998/sosioekon.s.v16i3.25511> Available online at
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
- Eza Syahbana¹, Rahel Veronika Siregar²
Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2001-2022 Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2025, 11(9.D), 77-88 DOI:
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12895> p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
- Fadillah (2016 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur 2009-2013 Jurnal Ilmiah
- Faisal, dkk. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi Regional.
- Febrianica, D. N., & Pratomo, D. S. (2015). Analisis dampak kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia (Jurnal Ilmiah). Malang: Universitas Brawijaya.
- Giovan F.Ch Mengko Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kota Tomohon Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No. 2 Bulan Februari 2023
- Heny Hermawati dkk Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel di Indonesia Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB) Volume/Nomor: Volume 10, Nomor 1
- I Wayan Eva Mudana¹ Purbadharma² Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp> Volume 7 Nomor 3, 2024 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022
- Indah Tri Utami & Mohammad Rofiuddin (2022) Pengaruh Upah Minimum, Belanja Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi Dengan Penduduk Mayoritas Muslim Terbanyak di Indonesia <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/15296>
- Kelly Bird & Chris Manning (n.d.) Upah Minimum dan Kemiskinan di Negara Berkembang: Simulasi dari Survei Rumah Tangga Indonesia JEL Classification: I31, J33, J38, O15 Email: KBird@cbn.net.id ; Chris.Manning@anu.edu.au
- Kuswanto¹, Indah Giyanti Permata Dew Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jurnal Ekonomi-Qu Vol. 6, No. 1, April 2016, Hal. 18-34
- Latri Wihastuti¹, Henny Rahmatullah² Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau

- Jawa Program Studi Pembangunan
Ekonomi Kewilayahan/Departemen
Ekonomika dan Bisnis/Sekolah
Vokasi Universitas Gadjah Mada,
Indonesia
llatri.wihastuti@ugm.ac.id
- Mauludi AC, A., dkk. (2023). Pengaruh
Upah Minimum, Pertumbuhan
Ekonomi, Indeks Pembangunan
Manusia, Dan Belanja Modal
Terhadap Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2017 s/d 2021
- Merdikawati, N., & Al Izzati, R. (2025).
Kebijakan Upah Minimum dan
Kemiskinan di Indonesia. Laporan
Penelitian Ekonomi.
- Natsir, I., dkk. (2025). Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Kemiskinan di Indonesia:
Pendekatan Ekonomi Makro. *Journal
of Innovative and Creativity*.
Universitas Pahlawan Tuanku
Tambusai. ISSN: 2775-771X.
- Nurina Merdikawati dan Ridho Al Izzati
(2025) Kebijakan Upah Minimum
dan Kemiskinan di Indonesia he
World Bank Econom ic Review ,
39(1), 2025, 191–210
<https://doi.org/10.1093/wber/lhae022>
- Okowali dkk 2025Pengaruh Rasio
Ketergantungan, Rasio Gini dan
UMKterhadap Tingkat Kemiskinan
di Provinsi Papua ISSN 2776-
4389JOURNALEconomics and
DevelopmentAnalysis[https://ejournal
.uksw.edu/inspire](https://ejournal.uksw.edu/inspire)
inspire.journal@uksw.eduVol.5No.1
Mei
- Penny Naluria Utami Penerapan Upah
Minimum Salam Meningkatkan
Kesejahteraan Bagi PPKerja
Determining Minimum Wages In
Improving Welfare For Workers
Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM, Kementerian
Hukum dan HAM email:
penny_utami@yahoo.com
- Putri Pramuditha HasibuanAnalisis
Pengaruh Pendidikan, Upah
Minimum dan Tenaga Kerja
Terhadap Tingkat Kemiskinand
IndonesiaJournal of Innovative and
CreativityUniversity of Pahlawan
Tuanku TambusaiISSN 2775-771X
(Online)ISSN2962-570X(Printed
- Rini Sulistiawati, Op. Cit, h. 201.
- Sa'diyah El Adawiyah Kemiskinan Dan
Faktor-Faktor Penyebabnya Volume
1 Nomor 1, April 2020, *Journal of
Social Work and Social Service e-
ISSN: 2721-6918*
- Siti Hanifah PENGARUH Pertumbuhan
Ekonomi,Upah Minimum,Dan
Pengangguran Terhadap Kemiskinan
Di Kabupaten Lamongan
Independent : *Journal Of Economics*
Volume 1 Nomor 3, Tahun 2021
- Siti Hanifah Pengaruh Perumbuhan
Ekonomi,Upah Minimum,Dan
Pengangguran Terhadap Kemiskinan
Di Kabupaten Lamongan
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu
Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press,
2009), h. 22
- Sri Pajriah1 a & Aan Suryana Analisis
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya
Kemiskinan Di Desa Pasirlawang
Kecamatan Purwadadi Kabupaten
Ciamis Jurnal Artefak: History and
Education, Vol. 5 No. 2 September
2018

Sudirman, Lili Andriani, Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi, Jurnal Of Economics And Business Vol.1 No.1 September 2017, h. 149.

Suprihati Lestari Dan Ria Repa Susana Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah e-ISSN: 2656-968X, p-ISSN: 2685-4228 Volume 4, Edisi 1 (Juli 2021), www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

Syamsul Arifin¹, Fahmi Ashari S. Sihalah Relevansi UMR terhadap Kesejahteraan Keluarga: Telaah Sistematis dan Analisis Kebijakan JUMA–Jurnal UMKM, Manajemen, dan Akuntansi, Agustus 2025, 2(1): hal 17-22

Tamaria Br. Sidebang, dkk (2024) Pengaruh Upah Minimum dan Pendapatan Pajak terhadap Kemiskinan di Indonesia urnal Internasional untuk Penelitian Tingkat Lanjut tamariasidebang120@gmail.com Beranda jurnal <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/ijar>

Tety Marini, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Berau, Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Vol 12, No 1, 2016, h. 111-112.

Wiwi Ostaafani Putri Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat

engangguran Di Provinsi Sumatra Batusangkar 2025 M/ 1447 H.